

**REGULASI PERUBAHAN NAMA ETNIS TIONGHOA PADANG PADA  
MASA ORDE BARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S1) Pada Jurusan Pendidikan Sejarah*



**Oleh:**

**BAYU ALHADAD EFENDI**

**NIM. 18046094/2018**

**PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

## HALAMAN PESETUJUAN SKRIPSI

### HALAMAN PESETUJUAN SKRIPSI

Regulasi Perubahan Nama Etnis Tionghoa Padang Pada Masa Orde Baru

Nama : Bayu Alhadad Efendi

Nim : 18046094

Program Studi : Pendidikan Sejarah

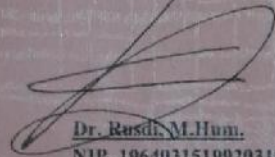
Departemen : Sejarah

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, September 2022

Mengetahui,

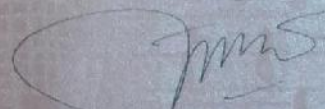
Ketua Departemen Sejarah



Dr. Rusdi, M.Hum.  
NIP. 196403151992031002

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing



Dr. Erniwati, SS, M.Hum.  
NIP. 197104061998022001

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

### HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Pendidikan Sejarah

Dapertemen Sejarah

Univeristas Negeri Padang

Regulasi Perubahan Nama Etnis Tionghoa Padang Pada Masa Orde Baru

Nama : Bayu Alhadad Efendi

Nim : 18046094

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Departemen : Sejarah

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, September 2022

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Emiwati, SS, M.Hum

1. 

2. Anggota : Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum

2. 

3. Anggota : Najmi, SS, M.Hum

3. 

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

### PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Alhadad Efendi  
Nim : 18046094  
Program Studi : Pendidikan Sejarah  
Departemen : Sejarah  
Fakultas : Ilmu Sosial

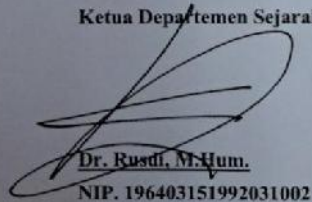
Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul "**Regulasi Perubahan Nama Etnis Tionghoa Padang Pada Masa Orde Baru**" adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan hasil karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, September 2022

Diketahui oleh,

Ketua Departemen Sejarah

  
Dr. Rusdi, M.Hum.  
NIP. 196403151992031002

Saya yang menyatakan

  
Bayu Alhadad Efendi  
NIM. 18046094

## ABSTRAK

BAYU ALHADAD EFENDI : 18046094/2018 Regulasi Perubahan Nama Etnis Tionghoa Padang Pada Masa Orde Baru. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2022

Skripsi ini membahas tentang proses asimilasi Etnis Tionghoa Padang melalui perubahan nama pada masa Orde Baru. Kehidupan Etnis Tionghoa tergantung kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa, terutama pada masa Orde Baru. Salah satu kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya adalah kebijakan asimilasi total terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia. Skripsi ini akan membahas tentang proses asimilasi Etnis Tionghoa Padang melalui perubahan nama pada masa Orde Baru.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan melakukan penulisan sejarah. Pada tahap euristik penulis mengumpulkan dokumen dan studi pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat, data yang didapat berupa dokumen Surat Pernyataan Ganti Nama Etnis Tionghoa Padang dan Tanda Terima Surat Pernyataan Pergantian Nama. Penulis juga melakukan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Pada tahap kritik sumber penulis melakukan pengolahan data berdasarkan kategori kritik internal dan eksternal. Pada tahap interpretasi, pertama data terkumpul sebanyak 100 data yang merubah nama tahun 1967 dan 500 data yang lahir dari tahun 1967-1998 yang dikelompokkan berdasarkan tahun kelahiran lalu diklasifikasikan berdasarkan latar belakang penamaan. Berikutnya dilakukan Historiografi.

Hasil temuan yang diperoleh pada penelitian ini bahwa untuk menciptakan Indonesia yang homogen maka pemerintahan Orde baru mengeluarkan berbagai macam peraturan yang bersifat asimilasi, salah satu peraturan tersebut adalah peraturan pergantian nama yang tertuang dalam Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.127/U/Kep/12/1966 dan Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 pada bab II pasal 5. Peraturan perubahan nama ini bertujuan untuk menjadikan Etnis Tionghoa menjadi Indonesia. Perubahan nama ini nyatanya dapat di polakan sebagai berikut, pertama ketika dikeluarkan peraturan pergantian nama pada tahun 1967 pola nama Etnis Tionghoa Padang adalah nama Indonesia dipengaruhi oleh unsur Jawa, lokal (Minangkabau), Barat, Agama dan nama Marga. Kedua pola nama pada Etnis Tionghoa yang lahir sesudah peraturan ini keluar yaitu tahun 1967-1998 adalah Pertama nama Indonesia yang mengandung unsur Jawa, agama seperti Baptis dan Islam, nama Barat, nama Indonesia dipengaruhi oleh nama Tionghoa, nama Indonesia dan nama Tionghoa sama dan yang terakhir nama Indonesia dipengaruhi unsur lain seperti unsur lokal dan terdapat juga unsur bali. Dari pola diatas ternyata pemberian nama Indonesia oleh Etnis Tionghoa Padang difaktori oleh beberapa hal seperti, faktor agama, geneologi, politik dan trend.

Kata kunci: Etnis Tionghoa Padang, Nama Etnis Tionghoa Padang, Asimilasi

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulis skripsi dengan judul : Regulasi Perubahan Nama Etnis Tionghoa Padang Pada Masa Orde Baru.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam pelaksanaan penyusunan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan baik moril maupun material dari berbagai pihak untuk itu melalui ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Rusdi, M.Hum, Sebagai Ketua Jurusan Sejarah
2. Ibuk Dr. Erniwati, M.Hum sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pemikiran-pemikiran dan arahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
3. Ibuk Dr. Siti Fatimah. M.Pd, M. Hum dan Ibuk Najmi, SS, M.Hum sebagai Dosen Penguji.
4. Bapak Drs. Etmi Hardi, M.Hum Sebagai dosen PA
5. Kepada kedua Orang Tua dan Saudara yang selalu memberikan semangat untuk penyelesaian skripsi ini serta kepada keluarga besar saya.
6. Kepada saudara Fharid, Sherly dan Tasya yang selalu menjadi tempat bercerita dan menjadi bagian dari kisah perjalanan hidup dari SMA hingga saat ini dan nanti.
7. Kepada keluarga besar Once (Aqsal, Bayu, Bima, Burhan, Deni, Dial, Fuad. Nanda dan Ojik) yang menjadi rumah bagi saya ketika masa kuliah.
8. Teman-Teman OO yang menjadi bagian dari cerita hidup penulis selama kuliah dan menulis skripsi ini.

Akhirnya Penulis Mengucapkan Terima Kasih kepada semua pihak yang membantu, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal dan penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 10 Agustus 2022

Bayu Alhadad Efendi

## DAFTAR ISI

HALAMAN PESETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI .....	ii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR DIAGRAM.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah .....	5
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Batasan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat.....	5
1. Tujuan .....	5
2. Manfaat .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	6
1. Studi Relevan .....	6
2. Tinjauan Konseptual .....	9
3. Kerangka Berfikir .....	19
E. Metode Penelitian.....	20
BAB II ETNIS TIONGHOA PADANG DALAM POLITIK NEGARA .....	23
A. Komunitas Tionghoa Padang .....	23
B. Kebijakan Pemerintahan Indonesia Terhadap Etnis Tionghoa .....	31
1. Kebijakan Pemerintahan Indonesia .....	31
2. Regulasi Menjadi Indonesia .....	34
3. Asimilasi Melalui Ganti Nama.....	48



BAB III POLA PERUBAHAN NAMA ETNIS TIONGHOA PADANG MASA ORDE BARU .....	57
A. Pola Nama Etnis Tionghoa Padang Sebelum Tahun 1967.....	57
B. Pola Nama Etnis Tionghoa Padang 1967-1998 .....	61
1. Pola Nama Etnis Tionghoa Kelahiran 1967-1977 .....	61
2. Pola Nama Etnis Tionghoa Kelahiran 1978-1987 .....	63
3. Pola Nama Etnis Tionghoa Kelahiran 1988-1998 .....	65
C. Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Nama.....	71
1. faktor agama.....	71
2. Faktor geneologi .....	72
3. Faktor politik negara (jawanisasi) .....	74
4. Trend.....	75
5. Pengaruh Unsur Lainnya .....	75
BAB IV PENUTUP .....	77
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN.....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat Pernyataan WNI oleh Etnis Tionghoa.....	43
Gambar 2 SBKRI.....	46
Gambar 3 Surat SKBRI Jusli Juslim .....	47
Gambar 4 Surat Pernyataan Pergantian Nama.....	55
Gambar 5 Surat Tanda Terima Surat Pernyataan pergantian nama .....	56

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Pola Nama Etnis Tionghoa Padang Tahun 1967.....	58
Diagram 2 Pola Nama Etnis Tionghoa Padang Tahun 1967-1977 .....	61
Diagram 3 Pola Nama Etnis Tionghoa Padang Tahun 1978-1987 .....	63
Diagram 4 Pola Nama Etnis Tionghoa Padang Tahun 1988-1998 .....	65
Diagram 5 Pola Nama Etnis Tionghoa Pada Masa Orde Baru .....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian .....	87
Lampiran 2 Rincian Wawancara .....	88
Lampiran 3 Undang-Undang 127/Kep/12/1966 .....	89
Lampiran 4 Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967.....	92
Lampiran 5 Surat Pernyataan Ganti Nama Etnis Tionghoa Padang .....	94
Lampiran 6 Tanda Terima Surat Pernyataan Ganti Nama .....	99
Lampiran 7 Menerima WNI.....	102
Lampiran 8 SBKRI .....	104
Lampiran 9 Akta Kelahiran.....	105

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

10 tahun terakhir penelitian tentang Etnis Tionghoa diketahui pada umumnya memiliki 2 nama, yaitu nama Tionghoa dan nama Indonesia.<sup>1</sup> Fenomena ini muncul setelah diberlakukannya Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.127/U/Kep/12/1966 tentang Proses Penggantian nama-nama Perseorangan dan nama keluarga Cina, dan dipertegas dengan Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967 pada bab II pasal 5 tentang warga Indonesia keturunan asing yang masih memakai nama China dianjurkan untuk merubahnya ke nama Indonesia.<sup>2</sup> Jika ditinjau lebih lanjut kedua peraturan di atas pada dasarnya tidak memaksa Etnis Tionghoa untuk merubah nama mereka menjadi nama Indonesia, karena peraturan tersebut bersifat anjuran.<sup>3</sup> Meskipun Bersifat anjuran nyatanya hampir seluruh Etnis Tionghoa di Indonesia merubah nama menjadi nama Indonesia untuk memudahkan urusan administrasi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Nama Indonesia yang dimaksud adalah nama Indonesia saja tanpa campuran unsur lain seperti Aldo Gunawan dan nama Indonesia yang mengandung unsur nama Barat atau baptis seperti Frederikus Tanujaya untuk lebih lanjut silahkan lihat, Budi Kurniawan, "Penggunaan Nama Barat oleh Etnis Tionghoa di Surabaya," *Jurnal Lakon* 1, no. 1 (2012): 12–20; Suharyo, "Pola Nama Masyarakat Keturunan Tionghoa," *Humanika* 18, no. 2 (2013): 1–10; Andhini Rahma Lutfiana, "Adaptasi Fonologis Pada Perubahan Nama Diri Etnik Tionghoa ke Nama Indonesia Mulai Tahun 1970-2019 Sebagai Bentuk Pemerintahan Identitas Budaya Etnik Tionghoa," *Sapala* 8, no. 2 (2021): 1–24.

<sup>2</sup> *Ibid*; Lampiran peraturan lihat lampiran 3 dan 4

<sup>3</sup> *Ibid.* hal 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Kedua peraturan di atas menjadi salah satu jembatan melaksanakan program pemerintah dalam rangka asimilasi.<sup>5</sup> Asimilasi terhadap Etnis Tionghoa bertujuan untuk menghilangkan identitas ketionghoaan agar menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Kebijakan asimilasi terhadap Etnis Tionghoa bisa dilihat dari berbagai bidang seperti pendidikan, bahasa, undang-undang kewarganegaraan, kebudayaan dan peraturan pergantian nama.<sup>6</sup> Salah satu bentuk program asimilasi dapat diwujudkan dengan melakukan pergantian nama menjadi nama Indonesia. Penamaan Indonesia bertujuan untuk menghilangkan identitas ke-Tionghoaan menjadi Indonesia.

Meskipun peraturan di atas sudah berlaku sejak tahun 1966, ternyata tidak seluruh Etnis Tionghoa di Indonesia yang melakukan pergantian nama dan walaupun melakukan pergantian nama, nama Indonesia mereka juga tidak dilakukan asal-asalan, hal ini diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Laylatul

---

<sup>5</sup> Asimilasi adalah perubahan pola kebudayaan untuk beradaptasi dengan mayoritas atau pembauran suatu kebudayaan yang ditandai hilangnya kebudayaan asli dan timbulnya kebudayaan yang baru. Untuk lanjut silahkan lihat Soejono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1983).

<sup>6</sup> Daud Ade Nurcahyo, "Kebijakan Orde Baru Terhadap Etnis Tionghoa". *Skripsi*. (Universitas Sanata Dharma, 2016), hal 8.

fitrya<sup>7</sup>, Sariah<sup>8</sup>, Andini Rahma Lutfiana<sup>9</sup>, Suharyo<sup>10</sup> dan Budi Kurniawan.<sup>11</sup> Seperti Etnis Tionghoa yang ada di Surabaya dan Bandung mereka masih menggunakan nama Tionghoa disamping mereka juga memiliki nama Indonesia.<sup>12</sup> Hal ini dikarenakan mereka tidak ingin kehilangan identitas kedinghooan sehingga mereka tetap memakai nama Tionghoa, dan peraturan pergantian nama juga hanya bersifat anjuran.

Pemberian nama ketika melakukan pergantian nama tidak dilakukan asal-asalan. Seperti di Surabaya, nama Indonesia Etnis Tionghoa Surabaya di polakan berdasarkan kemiripan bunyi/suara ketika menyebutkan nama Tionghoa, menggunakan nama Bulan atau hari besar dan nama Tokoh atau raja.<sup>13</sup> Begitupun dengan Etnis Tionghoa Semarang yang memiliki pola nama Indonesia seperti pemilihan nama berdasarkan Ortografis, nama berdasarkan hari besar, nama yang memiliki arti pengharapan, nama tokoh-tokoh terkenal dan nama Barat.<sup>14</sup>

---

<sup>7</sup> Etnis Tionghoa umumnya mengganti nama mereka menjadi nama Indonesia dikarenakan peraturan pergantian nama, walaupun begitu tidak seluruh Etnis Tionghoa Surabaya yang melakukan pergantian nama, hal ini dikarenakan biaya untuk mengganti nama cukup besar dan juga tidak ada kepatenan yang jelas antara nama yang merupakan nama Indonesia dengan nama yang dianggap bukan nama Indonesia., Laylatul Fitrya dan Sri Mastuti Purwaningsih, "Tionghoa dalam diskriminasi Orde Baru tahun 1967-2000," *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 1, no. 2 (2013): hal 162.

<sup>8</sup> Tidak seluruh Etnis Tionghoa yang mengganti nama walaupun sudah ada imbauan untuk mengganti nama, Sariah dalam hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa ada 26,24% masyarakat keturunan Tionghoa yang tidak memiliki nama Indonesia., Sariah, "Antroponimi dalam Obituari keturunan Tionghoa: Sebuah Tinjauan Deskriptif," *Balai Bahasa Bandung*, no. 1 (2011): 1–5.

<sup>9</sup> Hasil penelitian Lutfiana memperlihatkan bahwa nama Indonesia yang dipakai tetap mempertahankan unsur Tionghoa seperti meletakkan unsur marga kedalam dalam nama Indonesia, Lutfiana, *op. cit.* hal 23.

<sup>10</sup> Suharyo dalam penelitiannya mengelompokan nama Etnis Tionghoa berdasarkan kepada Ortografis, penggunaan nama Bulan atau Hari Besar, penggunaan nama yang mengandung Harapan dan menggunakan nama Tokoh Besar. Suharyo, *op. cit.* hal 5-9.

<sup>11</sup> Nama Indonesia Etnis Tionghoa kebanyakan mengandung unsur Barat, selain itu juga mengandung unsur lain seperti unsur Tionghoa dan unsur lainnya., Kurniawan, *op. cit.* hal 15.

<sup>12</sup> Fitrya dan Purwaningsih, *loc. cit.* ; Sariah, *loc. cit.*

<sup>13</sup> Eddy Sugiri, "Perspektif Budaya Perubahan Nama Diri Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Wilayah Pemerintahan Kota Surabaya," *Bahasa dan Seni* 31, no. 1 (2003): hal 59-67.

<sup>14</sup> Suharyo, *op. cit.* 5–10.

Peraturan pergantian nama juga diterapkan oleh etnis Tionghoa Kota Padang. Peraturan ini menyebabkan Etnis Tionghoa Padang juga memiliki dua nama seperti daerah lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ulilamri dalam wawancara.<sup>15</sup>

“Ketika memasuki masa Orde Baru Etnis Tionghoa mengganti nama menjadi nama Indonesia, termasuk saya dan teman-teman Tionghoa Padang juga melakukan pergantian nama”

Lalu bagaimana dengan etnis Tionghoa Padang? Bagaimana penamaan nama Indonesia etnis Tionghoa di Kota Padang menarik untuk di teliti, apa yang mempengaruhi penamaan Indonesia etnis Tionghoa?, apakah penamaan Indonesia etnis Tionghoa Padang sama dengan penamaan Tionghoa Suarabaya atau daerah lainnya? Apakah dipengaruhi oleh lokalitas, latar belakang agama, atau latar belakang keluarga ikut mempengaruhi penamaan mereka? Penelitian tentang etnis Tionghoa di kota Padang sudah banyak dilakukan, seperti karya dari Erniwati, Riniwaty Makmur dan Rahmi Surya Dewi, tetapi penulisan tentang nama etnis Tionghoa Padang belum ada, sehingga untuk itulah penelitian ini penting dilakukan. Bagaimana nama Etnis Tionghoa Padang pada masa Orde Baru akan menjadi fokus kajian pada penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan ulillamri seorang Etnis Tionghoa Padang kelahiran tahun 1960, wawancara dilakukan di kota Padang pada tanggal 20 April 2022



## **B. Rumusan Dan Batasan Masalah**

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penelitian ini fokus membahas tentang Bagaimana nama Orang Tionghoa Padang pada Orde Baru. Untuk memfokuskan penelitian maka di rumuskan pertanyaan:

1. Bagaimana regulasi perubahan nama Etnis Tionghoa Padang?
2. Bagaimana pola nama Etnis Tionghoa Padang pada masa Orde Baru?
3. Faktor Apa saja yang mempengaruhi penamaan Indonesia Etnis Tionghoa Padang masa Orde Baru?

### 2. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan kajian maka penelitian akan dibatasi. Batasan spasial penelitian ini dilakukan terhadap Etnis Tionghoa yang ada di Padang. Sedangkan untuk temporal dibatasi pada batasan awal 1967 karena pada tahun ini peraturan asimilasi terhadap Etnis Tionghoa mulai diterapkan, sedangkan untuk batasan akhirnya diambil pada tahun 1998 karena pada tahun ini masa Orde Baru berakhir.

## **C. Tujuan Dan Manfaat**

### 1. Tujuan

Penulisan ini secara umum untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan nama Etnis Tionghoa Padang pada masa Orde Baru. Maka tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Mendeskripsikan regulasi perubahan nama Etnis Tionghoa Padang

- b. Mendeskripsikan pola nama Etnis Tionghoa Padang pada masa Orde Baru
- c. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi penamaan Indonesia Etnis Tionghoa Padang masa Orde Baru

## 2. MANFAAT

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini menggambarkan tentang proses asimilasi melalui penamaan yang dilalui oleh Etnis Tionghoa Padang pada masa Orde Baru.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru yang bermanfaat terhadap masyarakat. Khususnya untuk melihat bagaimana pengelompokan dan faktor yang mempengaruhi penamaan Etnis Tionghoa padang pada masa Orde Baru.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### 1. Studi Relevan

Penelitian terkait perubahan nama Etnis Tionghoa ini telah ada dilakukan oleh beberapa penulis. Salah satunya adalah Suharyo dalam tulisannya yang berjudul Pola Nama Masyarakat Keturunan Tionghoa.<sup>16</sup> Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pola orang Etnis Tionghoa dalam Pemberian nama Indonesia yang dilihat dari aspek struktur

---

<sup>16</sup> Suharyo, *op. cit.* hal 1-10.

kata. Penelitian yang dilakukan oleh Suharyo datanya didapatkan melalui iklan duka cita yang diterbitkan di media massa seperti Suara Merdeka, Kompas maupun media massa lainnya. Penelitian Suharyo ini mengatakan bahwa nama Tionghoa mengalami penyesuaian grafis atau vonis ketika nama tersebut dirubah ke nama Indonesia. Lalu saat perubahan nama menjadi nama Indonesia, nama keluarga tetap dipertahankan sebagaimana nama aslinya, tetapi ada juga nama keluarga yang dipertahankan lalu digabung dengan suku kata yang lain seperti Loekito yang nama keluarga aslinya Loe atau Soeganda yang nama aslinya adalah Soe.

Penelitian yang dilakukan oleh Suharyo relevan dengan penelitian ini dikarenakan penelitian Suharyo dapat memberikan gambaran tentang pola nama Etnis Tionghoa secara umum, yang nanti akan berguna untuk melihat secara spesifik bagaimana kelompok dan kecenderungan nama Etnis Tionghoa Padang. penelitian Suharyo melihat nama dari sudut pandang linguistik sedangkan penelitian ini tidak saja melihat dari segi linguistik tetapi juga melihat dari hal-hal lain terhadap apa saja yang mempengaruhi nama Etnis Tionghoa pada masa Orde Baru.

Penelitian berikutnya yang relevan adalah penelitian Sugiri dengan judul penelitian Perspektif Budaya Perubahan Nama Diri Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Wilayah Pemerintahan Kota Surabaya.<sup>17</sup> Data penelitian didapatkan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan pencatatan

---

<sup>17</sup> Sugiri, "Perspektif Budaya Perubahan Nama Diri Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Wilayah Pemerintahan Kota Surabaya."

data. Sugiri dalam penelitiannya mengatakan bahwa umumnya Etnis Tionghoa yang berada di Surabaya tidak keberatan dengan adanya pergantian nama menjadi nama Indonesia.<sup>18</sup> Mereka menyetujui pergantian nama ini dengan tujuan agar tidak terisolasi dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan nama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa tidak dilakukan dengan sesuka hati, nama Indonesia yang akan digunakan masih memiliki kemiripan dengan nama Etnis Tionghoa atau harus memiliki makna.

Penelitian Sugiri ini relevan dikarenakan tema penelitian sama mengangkat tentang nama Etnis Tionghoa. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiri menggambarkan tantang pemilihan nama Etnis Tionghoa Surabaya. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini menggambarkan secara umum terhadap hal-hal yang mempengaruhi penamaan Etnis Tionghoa di kota Surabaya sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan memperinci hal-hal yang mempengaruhi nama Etnis Tionghoa kota Padang pada masa Orde Baru.

Penelitian berikutnya yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Budi Kurniawan dengan judul Penggunaan Nama Barat oleh Etnis Tionghoa di Surabaya.<sup>19</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Budi Kurniawan menggunakan metode kualitatif dengan data yang berasal dari nama peserta ujian HSK 2011 dan pengisian kusioner. Penelitian ini mengatakan bahwa Etnis Tionghoa yang berada di Surabaya dominan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal 60-61.

<sup>19</sup> Kurniawan, *op. cit.* hal 12-20.

menggunakan nama Barat yang di campur dengan nama Indonesia. tetapi ada juga yang seluruhnya menggunakan nama Barat. Nama Barat digunakan karena dianggap lebih moderen dan keren dari pada nama yang keseluruhannya menggunakan nama Indonesia.

Penelitian Budi Kurniawan relevan dengan penelitian ini karena penelitian Budi Kurniawan menggambarkan bahwa setelah reformasi nama Etnis Tionghoa dominan mengandung unsur barat, sedangkan penelitian ini akan melihat nama Etnis Tionghoa sebelum reformasi sampai awal reformasi yaitu 1967-1998. Penelitian Budi Kurniawan mengambil objek penelitian pada masa setelah selesainya Orde Baru sedangkan penelitian ini mengambil objek waktu pada masa Orde Baru.

## 2. Tinjauan Konseptual

### a. Etnis

Etnis menurut Koentjaraningrat adalah kelompok sosial yang jelas dan dapat dibedakan dengan kelompok yang lain berdasarkan bahasa dan identitas kebudayaan.<sup>20</sup> Sedangkan Wilbinson dalam Koentjaraningrat mengatakan bahwa etnis adalah suatu kelompok yang memiliki persamaan mulai dari warna kulit sampai kepada kepercayaan.<sup>21</sup> Menurut Sibarani Etnis adalah identifikasi sosial yang tercipta berdasarkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh suatu kelompok.

---

<sup>20</sup> Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2007), hal 27.

<sup>21</sup> *Ibid.*,

Etnis bisa tercipta karena adanya kesamaan baik dari sejarah, nenek moyang, asal usul dan bahasa yang tergambar dari simbol-simbol khas seperti agama, pakaian dan tradisi.<sup>22</sup> Dari penjelasan di atas etnis adalah kelompok sosial yang terbentuk karena adanya persamaan baik dari sejarah, nenek moyang, asal usul, kepercayaan, warna kulit dan bahasa. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan etnis adalah kelompok sosial yang berasal dari tempat yang sama, lalu terpusat kepada kesamaan norma, nilai, simbol, kepercayaan dan praktek budaya.

b. Etnis Tionghoa Padang

Istilah Tionghoa merujuk kepada orang-orang Tionghoa yang menetap di luar dari daratan Tiongkok.<sup>23</sup> Istilah Tionghoa lalu Tiongkok mulai digemakan pertama kali di Indonesia pada tahun 1900-an dengan berdirinya THHK (Tiong Hoa Hwee Koan/"Tjung Hwei Kwan"/Zhoungua Huiguan). Melalui THHK inilah istilah Tionghoa diperkenalkan untuk mengganti istilah lama yaitu Tjina/Cina. Istilah Tjina ini mulai tidak dipakai lagi karena dianggap istilah penyebutan status yang rendah, sehingga orang Cina yang berada di Indonesia saat itu meminta di panggil Tionghoa saja.<sup>24</sup>

Etnis Tionghoa sudah berada di Indonesia berabad-abad yang lalu sejak masa Kerajaan Nusantara. Kedatangan Etnis Tionghoa ke Nusantara

---

<sup>22</sup> Berlin Sibarani, "Bahasa, Etnisitas dan Potensinya terhadap Konflik Etnis," *Jurnal Bahas Unimed* 85, no. 39 (2013): 1–11,

<sup>23</sup> Erniwati, "Identitas Etnis Tionghoa Padang Masa Pemerintahan Belanda," *Patanjala* 11, no. 2 (Juni 2019): hal 185.

<sup>24</sup> Nurcahyo, *op. cit.* hal 17.

dikarenakan faktor perdagangan. Mereka berdagang dengan memanfaatkan angin Muson, mereka membutuhkan waktu untuk kembali ke Tiongkok sehingga banyak juga yang menetap di Nusantara.<sup>25</sup> Erniwati menjelaskan bahwa Etnis Tionghoa ini datang ke Indonesia terbagi atas tiga tahap, tahap pertama karena hubungan perdagangan dengan kerajaan Nusantara, tahap kedua ketika kedatangan bangsa Eropa dan perdagangan Internasional dengan Malaka sebagai pusatnya dan yang ketiga kedatangan saat Pemerintahan Hindia Belanda.<sup>26</sup> Hal di atas menjelaskan bahwa Etnis Tionghoa ini sudah lama berada di Indonesia, sehingga mereka menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Dari penjabaran di atas dapat diketahui Etnis Tionghoa adalah kelompok sosial yang terbentuk karena adanya persamaan baik dari sejarah, nenek moyang, asal usul, kepercayaan, warna kulit dan bahasa yang berasal dari Tiongkok dan telah lama tinggal serta telah terintegrasi dengan Bangsa Indonesia dan telah menjadi salah satu bagian dari Bangsa Indonesia.<sup>27</sup>

Etnis Tionghoa yang ada di Indonesia menyebar ke daerah-daerah yang ada di Indonesia termasuk Padang. Secara jelas kapan tepatnya Etnis Tionghoa datang ke Padang belum diketahui. Saat itu Malaka menjadi pusat perdagangan Internasional. Banyak pedagang dari Tiongkok, India dan Arab yang pergi berdagang ke Malaka. Melalui Malaka lah Etnis Tionghoa mampu untuk sampai ke pedalaman Sumatera. Sungai-Sungai di

---

<sup>25</sup> Erniwati, *Loc. cit*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal 190-191.

<sup>27</sup> Nurcahyo, *loc. cit.*

pedalaman Sumatera berhubungan dengan Malaka, para pedagang memanfaatkan sungai-sungai ini untuk berdagang lebih jauh ke pedalaman Sumatera hingga sampailah pedagang ke wilayah Sumatera Barat. Pada abad ke-13 Etnis Tionghoa semakin banyak datang ke Sumatera Barat ketika jalur untuk berdagang lada di bagian barat Sumatera di buka. Karena jumlah Etnis Tionghoa semakin banyak hingga pada akhirnya mereka mampu untuk membentuk komunitas mereka di Kota Padang.<sup>28</sup>

Kedatangan Etnis Tionghoa yang sudah berabad-abad memberikan waktu yang panjang untuk beradaptasi dengan budaya yang ada, sehingga membentuk keunikan tersendiri yang menjadi pembeda antara Etnis Tionghoa tiap-tiap daerah.<sup>29</sup> Etnis Tionghoa Padang sudah menjadi masyarakat Padang dengan keunikan tersendiri. Etnis Tionghoa Padang memakai bahasa yang sudah beradaptasi dengan bahasa Minang yang dikenal dengan bahasa pondok.<sup>30</sup> Selain itu dalam pernikahan Etnis Tionghoa Padang juga menggunakan adat pelemparan beras kunyit seperti yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau yang sudah bercampur dengan budaya Tionghoa, jadi pelemparan beras kunyit telah di campur dengan bitai.<sup>31</sup> Lalu budaya Minangkabau yang diserap oleh Etnis Tionghoa adalah musyawarah dan mufakat. Biasanya Etnis Tionghoa

---

<sup>28</sup> Erniwati, *Asap hio di ranah minang: komunitas Tionghoa di Sumatera Barat* (Yogyakarta: Yayasan Nabil, 2007), hal 73-88.

<sup>29</sup> Erniwati, *loc. cit.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal 187; Kezia Natalia Sjoftjan dan Suzy S. Azeharie, "Studi Komunikasi Budaya di Kota Padang (Akulturasi Budaya Minangkabau Pada Etnis Tionghoa di Kota Padang)," *Koneksi* 2, no. 2 (2019): hal 415.

<sup>31</sup> *Ibid.* hal 412.



melakukan musyawarah dan mufakat di rapat-rapat kongsi besar Heng Beng tong ataupun Hok Tek Tong, namun bila lebih luas dan bersifat umum maka dilakukan dalam wadah See Hien Kiong.<sup>32</sup>

Dari paparan di atas dapat disimpulkan Tionghoa Padang adalah kelompok sosial yang terbentuk karena adanya persamaan baik dari sejarah, nenek moyang, asal usul, kepercayaan, warna kulit dan bahasa yang berasal dari Tiongkok dan telah lama tinggal serta telah terintegrasi dengan masyarakat Padang dan budaya Minangkabau dan telah menjadi salah satu bagian dari Masyarakat Padang.

### c. Regulasi

Regulasi adalah peraturan yang dibuat untuk mengendalikan suatu kelompok, komunitas, organisasi atau Lembaga dan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>33</sup> Regulasi bertujuan mengendalikan masyarakat dengan memiliki batasan-batasan tertentu, regulasi mencakup seluruh bidang kehidupan.<sup>34</sup> Kebijakan regulasi muncul diakibatkan dari berbagai krisis dalam penentuan standar yang berlaku di masyarakat.<sup>35</sup>

Pemerintahan Orde Baru melihat bahwa saat itu Indonesia harus menentukan standar masyarakat yang dikatakan sebagai Indonesia,

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal 415.

<sup>33</sup> Wilma Silalahi, "Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): hal 58.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> D.D Shevilla dan Y.W. Nugrahanti, "Perbedaan Kualitas Informasi Akuntansi Sebelum dan Sesudah Pengabdian Penuh IFRS di Indonesia (Studi Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)". *Skripsi*. (Universitas Kristen Satya Wacana, 2015).

khususnya kepada masyarakat yang bukan berasal dari Indonesia seperti Etnis Tionghoa. Untuk menjadi masyarakat Indonesia yang homogen maka Pemerintahan Orde Baru membuat regulasi berbentuk peraturan-peraturan asimilasi. Asimilasi adalah proses seseorang atau kelompok yang awalnya berbeda menjadi sama dengan kelompok lain.<sup>36</sup> Menurut Harsojo asimilasi adalah sebuah proses sosial yang menyebabkan berkurangnya perbedaan antar Individual maupun antar kelompok yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan yang sama.<sup>37</sup> Bisa dikatakan bahwa asimilasi sebuah proses terhadap individu maupun kelompok yang menyerap budaya dan identitas kelompok lain sehingga menjadi bagian dari kelompok tersebut.<sup>38</sup>

Asimilasi secara umum bersifat linear terhadap hubungan kelompok minoritas dan mayoritas. Kelompok mayoritas memiliki pengaruh yang besar terhadap kelompok minoritas, sehingga mengakibatkan kelompok minoritas secara perlahan akan kehilangan identitas etnik mereka yang dahulunya menjadi pembeda dari kelompok mayoritas.<sup>39</sup>

Pada masa Orde Baru, pemerintah memaksakan asimilasi bagi Etnis Tionghoa.<sup>40</sup> Asimilasi tersebut bertujuan untuk membentuk identitas diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia.<sup>41</sup> Kebijakan asimilasi terhadap

---

<sup>36</sup> Titin Widarti, "Asimilasi sosial-budaya komunitas keturunan Arab di kelurahan condet Balekambang Jakarta Timur". *Skripsi*. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010), hal 18,

<sup>37</sup> Harsojo, *Pengantar Antropologi* (Bandung: BINACIPTA, 1967), hal 191.

<sup>38</sup> Selo Soemardjan, *Steriotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial* (Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita, 1998), hal 224-225.

<sup>39</sup> Widarti, *op. cit.* hal 20.

<sup>40</sup> Kurniawan, *op. cit.* hal 14.

<sup>41</sup> Fitrya and Purwaningsih, *op. cit.* hal 159.

Etnis Tionghoa bisa dilihat dari berbagai bidang seperti pendidikan, bahasa, undang-undang kewarganegaraan, kebudayaan dan peraturan pergantian nama.<sup>42</sup> Etnis Tionghoa mengekspresikan dirinya untuk menjadi bagaian dari bangsa indonesia sesuai dengan anjuran pemerintah Orde Baru, salah satunya adalah dengan merubah nama.<sup>43</sup> Pergantian nama bagi Etnis Tionghoa menjadi nama Indonesia dipengaruhi oleh banyak hal, bisa dipengaruhi agama, tempat tinggal atau asal usul (marga).<sup>44</sup> Sebagai bagian dari proses menjadi Indonesia, maka nama menjadi salah satu proses yang paling banyak dilakukan di Indonesia.<sup>45</sup> Perubahan nama ini dilakukan oleh etnis Tionghoa dengan maksud agar mereka dianggap sah menjadi Indonesia secara administrasi.<sup>46</sup> Untuk itu maka bagaimana proses asimilasi pergantian nama Etnis Tionghoa padang dari nama Tionghoa ke nama Indonesia dari tahun 1967-1998 dapat menjadi titik tolak identitas Etnis Tionghoa padang.

#### d. Identitas

Identitas secara epistemologi berasal dari kata *identity*, yang memiliki arti kenyataan yang sama atau mirip. Identitas bisa diartikan dengan identik atau suatu hal mirip dengan hal lainnya.<sup>47</sup> Identitas merujuk kepada ciri-ciri khusus individu atau suatu kelompok dalam kategori sosial

---

<sup>42</sup> Nurcahyo, *op. cit.* hal 8.

<sup>43</sup> Sariah, *op. cit.* hal 4.

<sup>44</sup> Lutfiana, *op. cit.* hal 7-21; Suharyo, *op. cit.* hal 5-9.

<sup>45</sup> Sariah, *op. cit.* hal 1; Kurniawan, *op. cit.* hal 12.

<sup>46</sup> Lutfiana, *loc. cit.*

<sup>47</sup> Alo Liliweri, *Makna Budaya Dalam Komunikasi Antar Budaya* (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Angkasa, 2007), hal 69.

tertentu.<sup>48</sup> Ada berbagai macam identitas, seperti Identitas diri, bisa dipahami sebagai ciri-ciri fisik tentang keyakinan serta keunikan yang membedakan seseorang dengan orang lain.<sup>49</sup> Lalu identitas nasional, merupakan jati diri atau ciri-ciri khusus suatu negara yang membedakan dari negara lainnya.<sup>50</sup> Identitas budaya<sup>51</sup> merupakan identitas yang muncul karena seseorang tergabung kedalam kelompok etnis tertentu yang meliputi tentang tradisi, bahasa, agama dan keturunan dari suatu kebudayaan.<sup>52</sup> Terakhir identitas etnik merupakan suatu kelompok yang memiliki persamaan budaya yang memiliki komitmen dan perasaan kebersamaan pada kelompoknya, serta adanya keterlibatan dalam aktivitas kelompoknya.<sup>53</sup>

Pada masa Orde Baru, pemerintah memaksa asimilasi terhadap Etnis Tionghoa untuk menjadi Indonesia, tujuannya adalah agar Etnis Tionghoa menanggalkan ke-Tionghoannya dan menjadi satu kesatuan dengan Indonesia.<sup>54</sup> Ketika Etnis Tionghoa menjadi Indonesia maka mereka akan meninggalkan budaya mereka sebagai identitas etnis dan budaya. Pemerintah memaksakan ke-Indonesiaan mereka melalui asimilasi dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bahasa, undang-

---

<sup>48</sup> Budi Santoso, "Bahasa Dan Identitas Budaya," *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 1, no. 1 (2006): hal 44.

<sup>49</sup> Alo Liliweri, *op. cit.* hal 95.

<sup>50</sup> Tatu Afifah, "Identitas Nasional di Tinjau Dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009," *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 187–98.

<sup>51</sup> Alo Liliweri, *loc. cit.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Widodo, "Pemahaman Identitas Etnik Untuk Mengembangkan Toleransi Masyarakat Kota Metro Lampung," *Founfasia X*, no. 1 (2019): 1–21.

<sup>54</sup> Fitrya and Purwaningsih, *op. cit.* hal 159.

undang kewarganegaraan, kebudayaan dan peraturan pergantian nama.<sup>55</sup> Ketika dikeluarkannya peraturan perubahan nama, hal ini menyebabkan representasi identitas Tionghoa melalui nama menjadi tidak jelas lagi karena ciri khas nama Tionghoa didalam nama Indonesia menjadi kabur.<sup>56</sup> Walaupun begitu nyatanya dalam penamaan Indonesia, nama Tionghoa benar-benar tidak dihilangkan. Mereka tetap mengadopsi nama Tionghoa ke nama Indonesia agar mereka tidak benar-benar kehilangan identitas Tionghoa.<sup>57</sup>

#### e. Nama

Nama menurut Djajasudarma adalah kata yang menjadi identitas makhluk hidup, benda dan peristiwa yang ada di dunia, nama ini bisa ada dikarenakan kehidupan manusia yang sangat kompleks.<sup>58</sup> Nama adalah bagian dari identitas seseorang yang membedakan dari orang lain.<sup>59</sup> Wibowo mengatakan nama diartikan sebagai sebuah kata yang memiliki fungsi untuk penyebutan seseorang sebagai penanda identitas seseorang.<sup>60</sup> Dari uraian di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan nama adalah sebuah sebutan untuk menandai dan membedakan orang yang satu dengan orang yang lainnya.

---

<sup>55</sup> Nurcahyo, *op. cit.* hal 8.

<sup>56</sup> Symphony Akelba Christian, "Identitas Budaya Orang Tionghoa Indonesia," *Jurnal Cakrawala Mandarin* 1, no. 1 (2017): 11–22, <https://doi.org/10.36279/apsmi.v1i1.11>.

<sup>57</sup> Lutfiana, *op. cit.* hal 2.

<sup>58</sup> Djajasudarma dan T. Fatimah, *Semantik 1* (Jakarta: Refika, 1999), hal. 30.

<sup>59</sup> Fennyliya Siska Gunawan dan Ong Mia Farao Karsono, "Pemberian Nama Tionghoa Keluarga Sub Suku Fúqīng di Banjarmasin," *Sastra Tionghoa Universitas Kristen Petra* 3 (2015): hal 4.

<sup>60</sup> Ridho Wibowo, "Nama Diri Etnik Jawa," *Humaniora* 1, no. XII (2001): 45–55.

Etnis Tionghoa secara tradisional percaya bahwa nama mengandung makna yang tinggi, seperti sebagai identitas diri, sebagai tanda pengenal keluarga dan sebagai harapan.<sup>61</sup> Nama dalam tradisi Etnis Tionghoa biasanya terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama nama keluarga atau yang sebut dengan marga, bagian kedua adalah nama generasi yang bertujuan untuk menjelaskan posisi seseorang dalam silsilah keluarga dan bagian yang ketiga adalah nama diri yang menjadi identitas diri.<sup>62</sup>

Pada masa Orde Baru ketika dikeluarkannya peraturan pergantian nama Etnis Tionghoa mengganti nama mereka kedalam nama Indonesia. Dalam peraturan pergantian nama, tidak dijelaskan nama Indonesia yang dimaksud seperti apa.<sup>63</sup> Sariah menjelaskan bahwa pada masyarakat Indonesia tidak ada aturan khusus dalam penamaan, karena rakyat Indonesia memberikan nama sesuai dengan apa yang mereka inginkan.<sup>64</sup> Karena hal itu nama Indonesia Etnis Tionghoa banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, agar ciri khas nama Tionghoa mereka hilang dan nama mereka terdengar seperti nama Indonesia.<sup>65</sup> Penamaan Indonesia bagi Etnis Tionghoa banyak dipengaruhi oleh berbagai hal seperti agama, tempat tinggal atau asal usul (marga).<sup>66</sup>

---

<sup>61</sup> Lutfiana, *op. cit.* hal 5.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal 5-6.

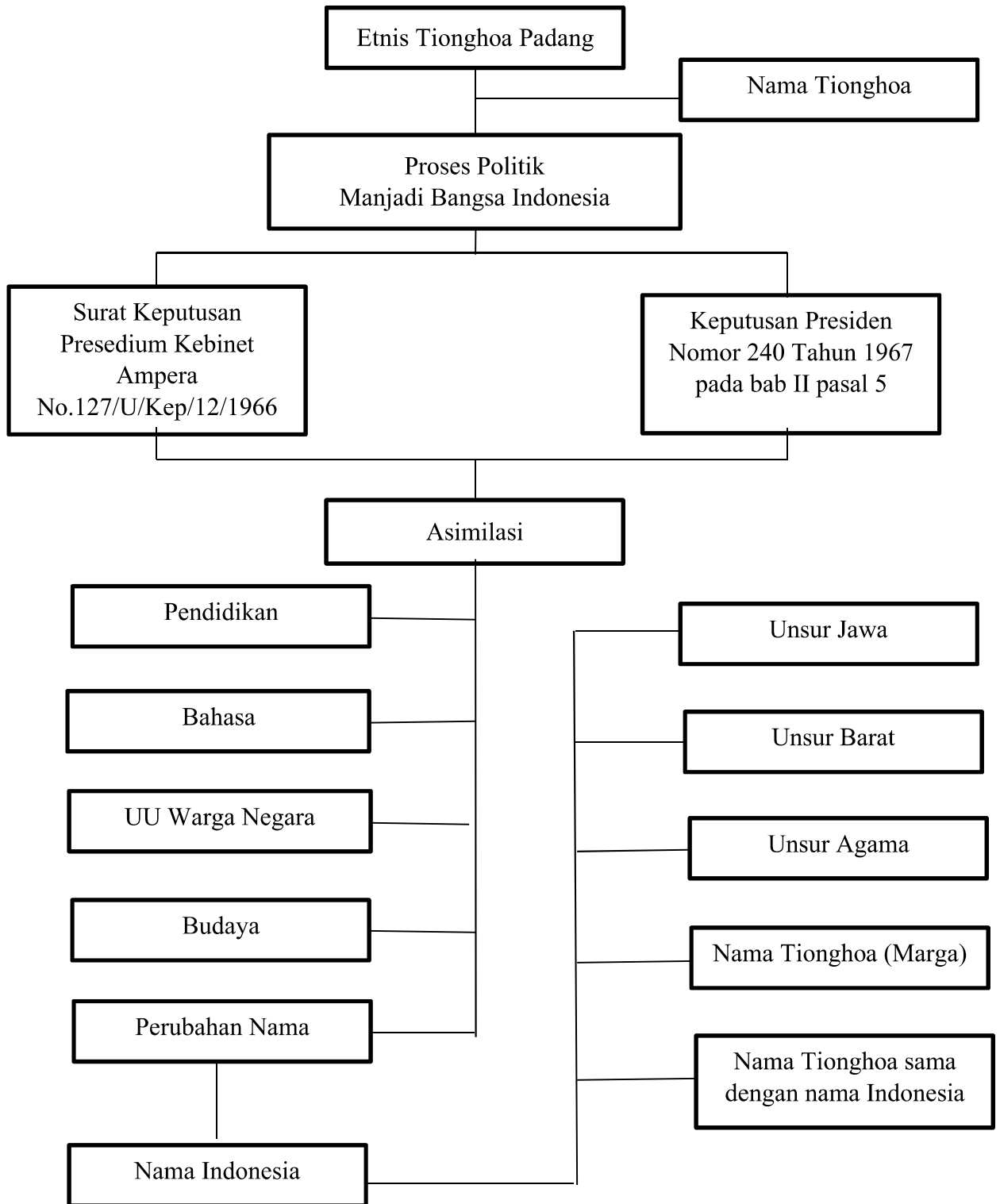
<sup>63</sup> Fitrya and Purwaningsih, *op. cit.* hal 162.

<sup>64</sup> Sariah, *op. cit.* hal 2.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Lutfiana, *op. cit.* hal 7-21; Suharyo, *op. cit.* hal 5-9.

3. KERANGKA BERFIKIR



## E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah Menyusun ulang gambaran peristiwa sejarah secara analisis dan kritis yang berdasarkan bukti dan fakta yang ada dari peninggalan masa lampau.<sup>67</sup> Tahap-tahap penelitian dengan metode sejarah sebagai berikut:

Heuristik adalah proses untuk mencari dan menemukan sumber-sumber yang sesuai dengan judul penelitian. Sumber sejarah adalah bahan untuk menulis sejarah yang mengandung bukti dan fakta baik berupa lisan maupun tulisan.<sup>68</sup> Pada tahap ini peneliti mencari sumber sebanyak mungkin yang terkait dengan judul penelitian. Pengumpulan sumber dilakukan dengan beberapa teknik, pertama Studi Pustaka dilakukan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Perpustakaan Daerah), Perpustakaan Universitas Negeri Padang, Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial UNP dan Labor Sejarah UNP. Lalu Studi Kearsipan yang dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Perpustakaan Daerah), dokumen yang didapat berupa Surat Pernyataan Ganti Nama Etnis Tionghoa, Tanda Terima Surat Perubahan Nama dan akte kelahiran.

Berikutnya observasi lapangan data yang didapat berupa nama-nama Etnis Tionghoa Padang yang lahir pada masa Orde Baru sebanyak 500 nama. Nama-nama ini diklasifikasikan dan dikelompokkan berdasarkan tahun lahir lalu dikelompokkan lagi berdasarkan kategorisasi penamaan. Data dalam penelitian ini diperkuat dengan melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh Etnis Tionghoa Padang yang

---

<sup>67</sup> Ismaun, *Sejarah Sebagai Ilmu* (Bandung: Historia Utama Press, 2005), hal 34.

<sup>68</sup> *Ibid.*,



memiliki dua nama dan lahir pada masa Orde Baru, diantaranya Jusli Juslim (Jie Guan Siang) dan Nuraini (Chi Ai Nie). Wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi langsung terkait penamaan Etnis Tionghoa.

Selanjutnya Kritik sumber merupakan usaha untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Kritik sumber ini terbagi dua, pertama kritik eksternal ialah cara melakukan verifikasi terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah. Kedua adalah kritik internal memastikan kredibilitas data. Pada kritik eksternal penulis melihat dokumen/data dari segi fisik dan keaslian data yang di peroleh, sedangkan pada kritik internal penulis menilai apakah data didalam dokumen kredibel atau tidak.

Tahap selanjutnya Interpretasi Fakta yang sudah didapatkan dan dikumpulkan lalu diinterpretasikan untuk bisa membentuk suatu cerita sejarah. Interpretasi sangat bersifat subjektif tergantung kepada diri penafsir dari fakta-fakta yang ada. Dasarnya dalam melakukan interpretasi seorang sejarawan bekerja dibawah tuntunan metodologi sejarah, sehingga subjektivitas bisa diminimalisir. Dalam meinterpretasikan data, pertama data diklasifikasikan berdasarkan tahun kelahiran. Setelah dikelompokan berdasarkan tahun kelahiran, data dikelompokan berdasarkan latar belakang penamaan. Terakhir data dianalisis berdasarkan konsep identitas.

Terakhir adalah Tahap penulisan merupakan bagian untuk mempresentasikan atau memaparkan sejarah yang sebenarnya berdasarkan bukti dan fakta yang ditemukan. Ketika seorang sejarawan masuk kedalam tahap ini, ia harus berfikir kritis dan menganalisa karena ia harus menghasilkan suatu sintesis

terhadap seluruh penemuannya yang dituangkan dalam suatu tulisan, hal inilah yang disebut sebagai historiografi.<sup>69</sup> Sehingga pada tahap ini peneliti melakukan penulisan tentang Asimilasi Etnis Tionghoa Padang : Melalui Perubahan Nama Pada Masa Orde Baru.

---

<sup>69</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hal 103-104.